

# **EFEKTIVITAS HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL**

**(Studi Kasus Di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan)**

## ***EFFECTIVENESS OF COMMUNITY FORESTRY IN SOCIAL FORESTRY PROGRAM (Case Study in Binaus Village, Central Mollo District, South Central Timor District)***

**Selvia Alfionita Dhiu<sup>1)</sup>, Lusia S. Marimpan<sup>2)</sup>, Nixon Rammang<sup>3)</sup>, Fadlan Pramatana<sup>4)</sup>**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

<sup>3)</sup> Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

<sup>4)</sup> Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

\*Email: selviaalfionitadhiu@gmail.com

### **ABSTRACT**

The Community Forest (HKm) program is one of the Social Forestry schemes carried out by the government to overcome the problem of forest destruction and to meet the needs of people who depend on forests. This study aims to determine the effectiveness of community forestry in the social forestry program through institutional management, area management and business management in Binaus Village, Central Mollo District, South Central Timor Regency. The method used in this research is a qualitative method. Determination of the sample in this study using the Slovin formula and it is known that the number of samples used in this study was 59 respondents. The sampling technique in this study used random sampling technique. The measurement scale used is the Likert scale model.

The results of this study indicate that institutional management in Gapoktan Berdikari categorized as effective, but there are also several obstacles that need attention such as the lack of member participation in each group meeting, and the lack of supervision and assistance. Area management in Gapoktan Berdikari has not been running well (quite effective), this is because there is no division of work areas for each group member also business management in Gapoktan Berdikari has not been running well (quite effective), this is due to the lack of supporting facilities and infrastructure in forest management, lack of business group strengthening training provided by the government and lack of business asset.

**Keywords** : Effectiveness; Social Forestry; Community Forest; Binaus Village.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yaitu dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan dengan memanfaatkan potensinya tanpa merubah fungsi kawasan hutan. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan tersebut adalah dengan melalui program Perhutanan Sosial. Karena program Perhutanan Sosial ini dianggap efektif sebagai pelestarian hutan,

seperti hutan yang gundul ataupun yang rusak dapat ditanami kembali oleh masyarakat yang berada disekitar hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dalam masyarakat hukum adat yang berada didalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat setempat. Skema Perhutanan sosial yang diterapkan di Desa Binaus adalah Hutan Kemasyarakatan.

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia I No P.88/Menhut-II/2014). Kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencarian masyarakat setempat.

Program Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Kemasyarakatan, sudah berjalan di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak tahun 2018, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8517/MENLHK/PSKS/PKPS/PSL.0/12/2018 dengan luas area  $\pm$  317 Ha pada kawasan hutan Mutis Timau dengan Fungsi Produksi Terbatas. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat menggantungkan

hidupnya terhadap hutan. Program hutan kemasyarakatan dapat menjadi solusi dalam merehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak dan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya terhadap keberadaan hutan (Yopita dkk, 2019). Efektivitas hutan kemasyarakatan yaitu sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus Di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

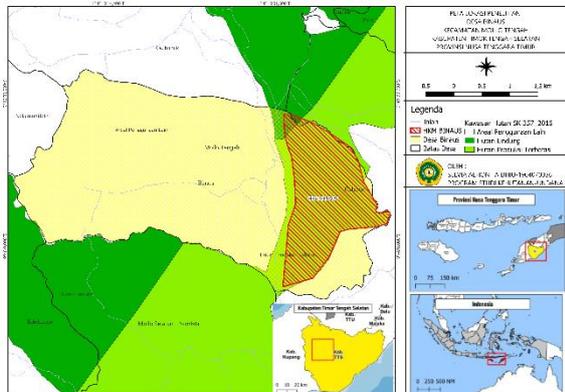
Mata pencaharian utama masyarakat di Gapoktan Berdikari adalah sebagian besar sebagai petani dengan luas lahan dari masing-masing masyarakat tidak mencukupi sehingga hutan kemasyarakatan dimanfaatkan dalam program perhutanan sosial untuk dikelola sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Luas hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh Gapoktan Berdikari melalui surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8517/MENLHK-PSKS/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dengan luas area  $\pm$  317 Ha, maka dengan ini akan memberikan peluang untuk keberhasilan perhutanan sosial dalam bentuk Hutan kemasyarakatan. Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hutan kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023.



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

## 2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera, perekam suara, laptop. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

## 2.3 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh ditempat penelitian dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah didapat dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dinas atau instansi terkait serta studi literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penentuan teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan teknik *random sampling*. *Random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut, karena anggota populasi tersebut yang homogen (sejenis). Gapoktan Berdikari memiliki 5 kelompok tani yang beranggotakan sebanyak 144 anggota. Berdasarkan formulasi Slovin (Umar, 2004; Nugroho dkk, 2018), maka

didapatkan jumlah responden sebanyak 59 responden.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Skala pengukuran yang digunakan yaitu model *skala likert*. Menurut Sugiyono (2019), yang di maksud dengan *skala likert* adalah suatu metode untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi, seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Keunggulan format *skala likert* dicerminkan dari keragaman skor sebagai akibat penggunaan skala, dimana pada penelitian ini skala yang dipergunakan yaitu maksimum skor 3 dan minimum skor 1, dikarenakan akan diketahui secara pasti jawaban responden, apakah cenderung kepada jawaban yang setuju maupun yang tidak setuju, sehingga jawaban diharapkan lebih relevan. Nilai setiap responden dijumlahkan dan dibuat peringkat dengan skala penilaian sebagai berikut. Selisih perkategori :

$$\frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah kategori}} = \frac{3-1}{3} = 0,66$$

Berdasarkan rumus di atas, dapat dilihat tingkat nilainya masing-masing seperti Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Skala kategori penafsiran

No.	Kategori tingkat keefektivan	
	Kriteria	Interval skor
1.	Efektif	2,34 -3,00
2.	Cukup Efektif	1,67 – 2,33
3.	Tidak Efektif	1,00 – 1,66

Sumber : Hasil Modifikasi Skala Likert Manolang 2007

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian

Desa Binaus adalah salah satu Desa di Kecamatan Mollo Tengah, yang secara administrasi termaksud ke dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Binaus mempunyai luas wilayah sebesar 16,61 Km<sup>2</sup>. Batas wilayah Desa Binaus yaitu sebelah timur berbatasan dengan Oelekam, sebelah

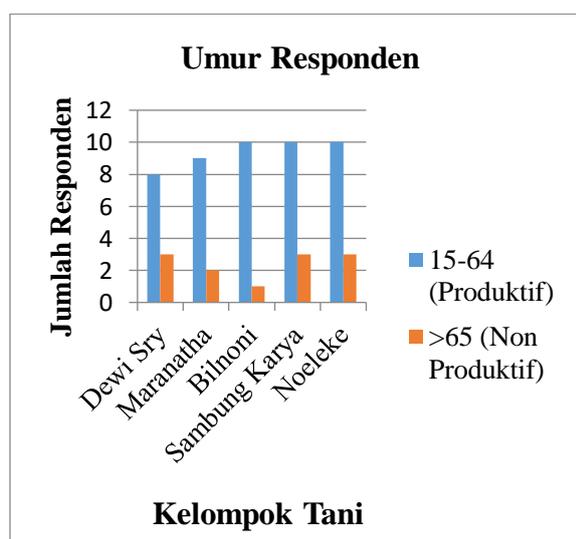
barat berbatasan dengan Nekemunifeto, sebelah utara berbatasan dengan Oelbubuk, dan sebelah selatan berbatasan dengan Bikekmeno.

Desa Binaus mempunyai kondisi iklim tropis yang yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu musim penghujan biasa terjadi antara bulan Desember s/d bulan Maret dan musim kemarau terjadi antara bulan April s/d bulan November. Desa Binaus berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut.

### 3.2 Karakteristik Responden

#### 3.2.1 Karakteristik Sebaran Umur Responden

Umur seseorang biasanya menentukan kemampuannya dalam melakukan aktifitas serta kematangan dalam perbuatan atau tindakan (Khaeruddin, 2018). Menurut Kemenkes RI tahun 2017 masyarakat dapat di kategorikan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok usia belum produktif (<15 tahun), kelompok usia produktif dengan rentang usia (15-64 tahun), dan kelompok usia non produktif (>65 tahun). Data mengenai sebaran umur responden di lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 2.



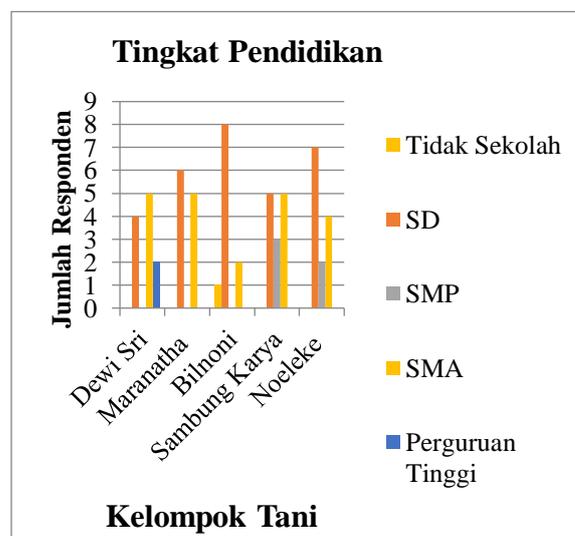
Gambar 2 Sebaran Umur Responden di Gapoktan Berdikari

Berdasarkan Gambar 2 sebaran umur kelima kelompok tani yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu kisaran umur 32-64 tahun yang tergolong produktif

sebanyak 47 responden (79,66%), dan kisaran umur 65-85 tahun yang tergolong non produktif sebanyak 12 responden (20,34%). Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa sebagian besar responden di lokasi penelitian didominasi oleh responden dengan kategori umur produktif sebanyak 47 responden (79,66%) dari 59 responden.

#### 3.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seorang melalui pendidikan formal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin cepat daya adaptasi terhadap perubahan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara langsung bersama para responden di Gapoktan Berdikari dapat di ketahui bahwa tingkat pendidikan dari masing-masing anggota kelompok tani dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Tingkat Pendidikan Responden di Gapoktan Berdikari

Berdasarkan Gambar 3 tingkat pendidikan kelima kelompok tani yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu Tidak Sekolah sebanyak 1 responden (1,69%), tingkat pendidikan SD sebanyak 30 responden (50,85%), tingkat pendidikan SMP sebanyak 5 responden (8,47%), tingkat pendidikan SMA sebanyak 21 responden (35,59%), dan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 2 responden (3,39%).

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa sebagian besar responden di lokasi penelitian didominasi oleh tingkat pendidikan SD sebanyak 30 responden (50,85%) dari 59 responden.

### 3.3 Kelola Kelembagaan

Kelembagaan adalah bagian penting dari setiap organisasi. Kelembagaan merupakan perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa percaya, serta konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya (Sari, dkk, 2013). Gapoktan Berdikari memiliki sistem kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan ketua seksi yang dimiliki terkait pengelolaan HKm. Tujuan utama dalam pembentukan Gapoktan Berdikari adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Dalam pengelolaan kelembagaan tetap memperhatikan kebersamaan dalam pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan sesuai dengan konsep kelembagaan, hal ini sejalan dengan Sya`rani dkk, (2017) yang menjelaskan bahwa konsep kelembagaan menunjukkan hubungan pola tindakan yang selalu berbaur dalam organisasi dan bersifat normatif.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kelola kelembagaan menggunakan *Skala likert*, dari 8 pernyataan dengan jumlah 59 responden maka disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2. Pernyataan Kelola Kelembagaan

Pernyataan	Total Skor Kelompok Tani					Jml	Kategori
	Dewi Sri	Maranatha	Bilnoni	Sambung Karya	Noeleke		
Dokumen nama pengurus anggota kelompok tani Gapoktan Berdikari	33	33	33	39	39	177	<b>3,00/ Efektif</b>
Penjelasan peran atau tugas setiap kelompok	33	33	33	39	39	177	<b>3,00/ Efektif</b>
Aturan dan sanksi dalam kelompok tani	33	33	33	39	39	177	<b>3,00/ Efektif</b>
Program HKm yang dilaksanakan kelompok tani berjalan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah	31	32	33	37	38	171	<b>2,90/ Efektif</b>
Pertemuan pengurus atau anggota kelompok tani	32	33	33	39	38	175	<b>2,97/ Efektif</b>
Administrasi kelompok di Gspoktsn Berdikari (memiliki buku tamu, daftar hadir, buku surat menyurat)	32	32	31	37	39	171	<b>2,90/ Efektif</b>

Pengawasan dan pendampingan dari pemerintah terkait pelaksanaan program HKm	25	23	25	30	31	134	<b>2,27/ Cukup efektif</b>
Keterlibatan anggota kelompok terhadap program HKm	33	33	33	39	39	177	<b>3,00/ Efektif</b>

Hasil penilaian pernyataan kelola kelembagaan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan pernyataan pertama dapat diketahui bahwa ada dokumen nama-nama pengurus anggota kelompok tani dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 3,00 yang termaksud dalam kategori Efektif. Karena berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan semua kelompok tani di HKm Berdikari memang memiliki dokumen nama-nama pengurus dan anggota kelompok tani.

Berdasarkan pernyataan ke-2 penjelasan peran atau tugas dari setiap kelompok dengan di peroleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 3,00 yang termaksud dalam kategori Efektif. Karena berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa sudah ada penjelasan peran dan tugas setiap badan pengurus yang dilakukan pada awal kegiatan terbentuknya HKm dan juga peran atau tugas setiap pengurus kelompok juga sudah tercantum dalam AD/ART Gapoktan Berdikari.

Berdasarkan pernyataan ke-3 aturan dan sanksi dalam kelompok tani tersebut dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 3,00 yang termaksud dalam kategori Efektif. Berdasarkan hasil penelitian, aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Hkm di Gepoktan Berdikari sudah tercantum dalam AD/ART Gapoktan Berdikari.

Berdasarkan pernyataan ke-4 program HKm yang dilaksanakan oleh kelompok tani hutan berjalan sesuai dengan ketentuan yang diberikan pemerintah dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 2,90 yang masih termaksud dalam kategori Efektif.

Berdasarkan pernyataan ke-5 pertemuan pengurus atau anggota kelompok

tani dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 2,97 yang masih termaksud dalam kategori Efektif. Berdasarkan hasil penelitian, Gapoktan Berdikari mengagendakan pertemuan anggota yang diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dan bisa dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu.

Berdasarkan pernyataan ke-6 kelengkapan administrasi kelompok (memiliki buku tamu, daftar hadir, buku surat menyurat) dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 2,90 yang masih termaksud dalam kategori Efektif. Namun kelengkapan administrasi kelompok masih sangat minim, hal ini dikarenakan oleh tingkat pendidikan mereka paling tinggi tamatan SD, sehingga kemampuan dalam mengelola administrasi masih lemah.

Berdasarkan pernyataan ke-7 pengawasan dan pendampingan dari pihak pemerintah terkait program HKm dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 2,27 yang termaksud dalam kategori Cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini penyuluh kehutanan masih belum maksimal, hal ini dikarenakan jumlah penyuluh kehutanan di wilayah ini hanya berjumlah 1 orang sehingga mendapatkan kesulitan bila harus terus berulang-ulang pulang dan pergi.

Berdasarkan pernyataan ke-8 keterlibatan anggota kelompok terhadap program HKm dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 3,00 yang termaksud dalam kategori Efektif.

Kelola kawasan meliputi kegiatan yang difokuskan pada pengelolaan lahan yang digunakan untuk mata pencarian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pengamanan kawasan hutan (Fito dkk, 2020; Musdalifa dkk, 2023). Gapoktan Berdikari menggunakan sistem pemanfaatan kawasan dengan pola penanaman *agroforestry* yang memadukan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. *Agroforestry* adalah sistem penggunaan lahan yang memadukan antara pepohonan dan tanaman semusim dalam suatu sistem pengelolaan lahan (Yulian dkk, 2016). *Agroforestry* yang

### 3.4 Kelola Kawasan

dikembangkan di Gapoktan Berdikari yaitu Kemiri (*Aleurites moluccanus*), Cendana (*Santalum album*), Alpukat (*Persea Americana*), Nangka (*Artocarpus heterophyllus*), Sirih (*Piper betle* (L)), Jeruk (*Citrus sinensis* (L)), Jagung (*Zea mays* (L)), Nenas (*Ananas comosus* (L.) Merr., Ubi-ubian, Kacang-kacangan, dan Tanaman Holtikultura.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kelola kawasan menggunakan *Skala likert*, dari 3 pernyataan dengan jumlah 59 responden maka disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3. Pernyataan Kelola Kawasan

Pernyataan	Total Skor Kelompok Tani					Jml	Kategori
	Dewi Sri	Maranatha	Biloni	Sambung Karya	Noeleke		
Kesadaran dan usaha dalam perlindungan keanekaragaman hutan di Gapoktan Berdikari	32	33	32	37	39	173	<b>2,93/ Efektif</b>
Melaksanakan tugas dari pusat terkait pengelolaan HKm dengan penuh tanggung jawab di Gapoktan Berdikari	33	33	33	39	39	177	<b>3,00/ Efektif</b>
Pembagian wilayah kerja untuk setiap anggota kelompok Gapoktan Berdikari	11	11	11	13	13	59	<b>1,00/ Tidak efektif</b>

Hasil penilaian kelola kawasan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan pernyataan pertama dapat diketahui bahwa kesadaran dan usaha dalam perlindungan keanekaragaman hutan dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 2,93 yang masih termaksud dalam kategori Efektif. Dalam hal ini anggota kelompok tani di Gapoktan Berdikari dalam mengelola hutan mereka masih mempunyai kesadaran dan usaha dalam menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman berupa penebangan liar dan perambahan hutan yang bersifat merusak. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tingkat kesadaran

masyarakat terhadap hutan di Gapoktan Berdikari yaitu adanya

pengurangan lahan kritis dan berkurangnya tingkat kebakaran hutan yang ada pada kawasan kelola mereka.

Berdasarkan pernyataan ke-2 anggota kelompok tani melaksanakan tugas dari pusat terkait pengelolaan HKm dengan penuh tanggung jawab dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 3,00 yang termaksud dalam kategori Efektif. Dengan adanya program Perhutanan Sosial, masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan juga ikut bertanggung jawab dalam kelestarian hutan tersebut. Kelestarian hutan

dapat dipertahankan dengan pengelolaan HKm sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Yani dkk, 2017).

Berdasarkan pernyataan ke-3 bahwa belum ada pembagian wilayah kerja untuk setiap anggota kelompok tani dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 1,00 yang termaksud dalam kategori Tidak efektif. Pembagian areal kerja kepada masing-masing anggota kelompok perlu dilakukan, karena dengan adanya pembagaian areal kerja kepada anggota kelompok, pengelolaan lahan dapat lebih mudah dikontrol dan di evaluasi serta dengan adanya penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada masing-masing anggota yang transparan, masyarakat tidak saling curiga dan tidak saling merebut lahan.

### 3.5 Kelola Usaha

Hutan yang dikelola oleh Gapoktan Berdikari memiliki ragam jenis komodi yaitu Kemiri (*Aleurites moluccanus*), Cendana (*Santalum album*), Jeruk (*Citrus sinensis* (L)), Alpukat (*Persea Americana*), Pisang (*Musa*

*Paradisiaca*), Pinang (*Areca catechu*), Sirih (*Piper betle* (L)), Ubi-ubian, Kacangkacangan, dan Tanaman Holtikultura. Keberadaan HHBK dan tanaman MPTS di kawasan HKm Berdikari menjadi salah satu sumber pendapatan anggota kelompok tani HKm Berdikari dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya hasil panen masyarakat tidak dijual namun dijadikan sebagai bahan konsumsi dalam keluarga, namun ada juga petani yang menjual hasil hutan di pasar diluar daerah dan juga langsung ke pengumpul karena akses yang lebih dekat dan dapat terjual dalam waktu lebih cepat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, anggota kelompok tani HKm Berdikari memperoleh pendapatan berkisar sebesar 500.000.-1.000.000 per bulan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kelola kawasan menggunakan *Skala likert*, dari 4 pernyataan dengan jumlah 59 responden maka disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 4. Pernyataan Kelola Usaha

Pernyataan	Total Skor Kelompok Tani					Jml	Kategori
	Dewi Sri	Maranatha	Bilnoni	Sambung Karya	Noeleke		
Sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah di Gapoktan Berdikari	22	24	25	28	30	129	<b>2,19/ Cukup efektif</b>
Kegiatan pelatihan penguatan kelompok usaha yang dilakukan oleh pemerintah di Gapoktan Berdikari	11	11	11	13	13	59	<b>1,00/ Tidak efektif</b>
Modal kelompok untuk dana usaha Gapoktan Berdikari	11	11	11	13	13	59	<b>1,00/ Tidak efektif</b>
Jaringan pasar hasil produksi Gapoktan Berdikari	33	33	33	39	39	177	<b>3,0/ Efektif</b>

Hasil penilaian kelola kawasan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan

pernyataan pertama dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 2,19 yang termaksud dalam kategori Cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam pelaksanaan pola HKm di Gapoktan Berdikari, masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan saprodi yaitu benih, pupuk dan obat-obatan dalam pengembangan tanaman hortikultura serta alat mesin pertanian yaitu traktor. Menurut Moeliono dkk, (2015), agar kegiatan HKm berjalan dengan baik dan optimal, pemerintah harus memberikan bantuan kepada kelompok HKm setelah izin dikeluarkan.

Berdasarkan pernyataan ke-2 bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan kegiatan pelatihan penguatan kelompok usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 1,00 yang termaksud dalam kategori Tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, masyarakat memang belum pernah mendapatkan pelatihan penguatan kelompok usaha dalam hal pengelolaan hasil hutan yang maksimal yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan ke-3 bahwa tidak ada modal kelompok untuk dana usaha dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 1,00 yang masih termaksud dalam kategori Tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat belum mendapatkan modal kelompok dalam bentuk dana usaha melainkan berupa bantuan Pembangunan Perhutanan Sosial Nasional (Bangpesona) berupa modal usaha anakan tanaman jeruk, sengon dan pinang serta ternak sapi. Menurut Saheriyanto and Suhaimi. 2021, Akses modal menjadi penting dimiliki agar dapat membantu mengurangi resiko kegagalan dalam pengelolaan usaha.

Berdasarkan pernyataan ke-4 bahwa jaringan pasar hasil produksi dilakukan dalam daerah dan diluar daerah dengan diperoleh kategori yang didapat dari 5 KTH yaitu sebesar 3,00 yang termaksud dalam kategori Efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, Akses pasar dalam pemasaran hasil hutan di Gapoktan Berdikari yaitu masyarakat menjual hasil panen mereka dalam daerah dan diluar daerah dan juga secara langsung dengan pihak pembeli yaitu menjual hasil panen ke pedagang pengumpul.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelola kelembagaan di Gapoktan Berdikari dapat dikategorikan efektif, namun terdapat beberapa kendala juga yang perlu diperhatikan seperti masih kurangnya partisipasi anggota dalam setiap pertemuan kelompok, dan kurangnya pengawasan dan pendampingan.
2. Kelola kawasan di Gapoktan Berdikari belum berjalan dengan baik (cukup efektif) hal ini dikarenakan belum adanya pembagian areal kerja untuk masing-masing anggota kelompok.
3. Kelola usaha di Gapoktan Berdikari belum berjalan dengan baik (cukup efektif), terdapat beberapa tantangan besar yang harus diatasi yakni minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan hutan, kurangnya pelatihan penguatan kelompok usaha yang diberikan pemerintah serta kurangnya modal usaha.

### 4.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi pengawasan dari petugas lapangan (penyuluh) agar lebih efektif dalam melakukan

pendampingan terhadap kelompok tani hutan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

2. Perlu adanya kegiatan pelatihan terhadap petani pengelola hutan kemasyarakatan berdikari terkait pengolahan hasil hutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Perlu mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang usaha tani agar mereka dapat memasarkan hasil hutan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang *Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- Anonim. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut1/2014 Tentang *Hutan Kemasyarakatan*.
- Anonim. 1999. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.
- Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. 2015. *Ijin saja tidak cukup: Belajar dari hutan kemasyarakatan (HKm) Bulukumba*. Bogor: World Agroforestry Center (ICRAF) SouthEast Asia Regional Program
- Musdalifah., Yusran., Adray, A. S. (2023) *Tata Kelola Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Malaka 01 Hutan Kemasyarakatan Di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros*. Jurnal Kehutanan Papuaasia, 9 (1) : 18-28.
- Khaeruddin. 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah.
- Makasar.
- Khairiansyah, M., Zainal, S., & Nugroho, J. (2018). *Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Hutan Mangrove di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang*. Jurnal Hutan Lestari, 6(2), 416–427.
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). *Pendampingan dan akses modal sebagai strategi access reform dari tanah pelepasan kawasan hutan di kabupaten Barito Kuala*. Jurnal Pertanahan, 11(1), 76–88
- Sari, N., Golar, dan Toknok. 2013. *Kelembagaan kelompok tani hutan program pendampingan SCBFWM disekitar sub daerah aliran Sungai Miu (Kasus Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi)*. Jurnal Warta Rimba. 1(1): 9;16.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta)
- Sya'rani, R., Awang, S.A., Supriyatno, N & Purwanto, R.H. (2017). *Universu Kelembagaan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil. 1(1). 143-160. Doi: 10.30598/jhppk.2016.1.2.143. et al (2017).
- Yani, A., Iswandi R. M., Syaf H. 2017. *Implementasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan Ambololi di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)*. Dalam Jurnal Perencanaan Wilayah Volume 2, Nomor 2.
- Yopita, S., Gunggung, S., Hery, S. 2019 *Efektivitas Program Perhutanan Sosial Dalam Bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Desa*

*Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang  
Provinsi Bengkulu. Jurnal Penelitian  
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan  
Lingkungan Volume 8, Nomor 1.*

Yulian R, Hilmanto R, Herwanti S. 2016.  
*Nilai Tukar Pendapatan Rumah  
Tangga petani Agroforestri di Hutan  
Kemasyarakatan Bina Wana Jayadi  
Kesatuan pengelolaan Hutan  
Lindung Batutegi Kabupatenn  
tanggamus. Jurnal Sylva Lestari, 4  
(2) : 39-50.*